

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem politik demokrasi merupakan sistem yang paling banyak dilaksanakan seluruh negara di dunia. Secara sederhana demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, negara yang mengklaim bahwa dirinya demokrasi maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berperan untuk mengontrol dan mengendalikan serta mengambil kebijakan negara secara langsung. Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. Seperti yang dikutip oleh I Made Krisna yaitu demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk memperoleh atau meraih suara.¹

Demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan, pernah dilakukan pada zaman Yunani kuno. Cara mengambil keputusan dengan berkumpulnya seluruh laki-laki yang telah dewasa di sebuah lapangan yang luas. Dan semua bebas untuk bermusyawarah dan mengeluarkan pendapatnya. Semua memiliki kesempatan langsung dalam mempengaruhi kebijakan dan aturan yang akan dibuat di dalam negaranya.

¹ I Made Krisna. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 14

Dewasa ini, demokrasi seperti itu tidak ditemukan lagi karena keadaan geografis di negara yang luas. Pada umumnya negara memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dipilih oleh warga negara melalui pemilihan yang dikenal dengan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan salah satu syarat bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi. Pada negara demokrasi, pemilihan umum adalah syarat dari demokrasi itu sendiri.² Dengan pemilu, rakyat bisa mendapat peran di dalam negaranya. Bahkan pemilu adalah aspek terpenting di dalam demokrasi karena tanpa pemilu rakyat akan kehilangan hak-hak dasarnya dalam berpolitik. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki lembaga negara karena mereka hanyalah perpanjangan tangan dari rakyat dan tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam menyelenggarakan pemerintahan. Intinya pemilu menjadi alat kontrol terhadap usia kekuasaan.

Fungsi utama diadakannya pemilihan umum yaitu terlaksananya transfer kekuasaan secara damai dan teratur serta pelembagaan konflik. Tujuan diadakannya pemilihan umum yaitu memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan daerah.³

Melalui pemilu akan terwujud suatu mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat

² Miriam Budiarjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 461

³ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2010, Hal. 405

diharapkan pula memahami fungsi penting dari pemilu tersebut. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan adanya partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 1 ayat 1 yaitu pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴

Pemilihan kepala daerah pada tingkat daerah dikenal dengan sebutan Pilkada. Pilkada merupakan salah satu bagian dari penerapan nilai demokrasi. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 2015 Tentang pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 1 ayat 1 Tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁵

⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 2012, *tentang pemilu DPR, DPD, DPRD* pada pasal 1 ayat 1.

⁵ Undang-undang No.8 tahun 2015, *tentang Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota* pada pasal 1 ayat 1.

Hasil dari Pilkada tidak terlepas dari perilaku memilih masyarakat. Perilaku memilih menjadi sebuah objek penelitian menarik, walaupun sebenarnya perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik dari masyarakat yang menuntut keterlibatan dalam politik yaitu memilih kandidat.

Dalam teori perilaku memilih, terdapat tiga pendekatan yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang dalam memberikan pilihannya yaitu: pendekatan Sosiologis, Psikologis dan Pilihan Rasional. Di negara yang sedang menuju transisi demokrasi, faktor-faktor yang dominan mempengaruhi perilaku memilih dalam masyarakat yaitu faktor ikatan sosial seperti etnis dan daerah asal, serta faktor kandidat.⁶

Dalam pendekatan sosiologis, perilaku memilih masyarakat dipengaruhi oleh aspek sosiologis seperti lingkungan sosial, ekonomi, etnis, tradisi keluarga, faktor orangtua, pekerjaan, tempat tinggal, faktor usia, jenis kelamin dan sebagainya.⁷ Terkait dengan masalah kelas sosial dan orientasi keagamaan, ras dan etnik juga dipercaya sebagai faktor sosiologis yang memengaruhi bagaimana seorang pemilih partai politik atau calon pejabat publik. Partai yang memperjuangkan kesetaraan ras dan etnik cenderung didukung oleh kelompok ras dan etnik minoritas karena kelompok yang berkepentingan dengan isu tersebut.⁸ Oleh karena itu, aspek yang telah dijabarkan di atas menjadi acuan untuk melihat bagaimana perilaku memilih dalam suatu kelompok masyarakat.

⁶ Kadek dwita Apriani, 2012, *Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor kandidat terhadap perilaku memilih dalam Pilkada Kabupaten Tananan-Bali tahun 2010*. Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm.14.

⁷ Asrinaldi, 2012, *Politik masyarakat miskin Kota*. Yogyakarta: Gave media, hlm.25.

⁸ Saiful Mujani, R.Wilian Liddle, & Kuskridho Ambard, 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan hlm.19-20.

Faktor orientasi kedaerahan merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam pendekatan sosiologis dimana partai politik atau calon pejabat publik yang punya asal-usul atau keterikatan dengan daerah tertentu condong akan didukung oleh pemilih dari daerah bersangkutan. Walaupun berbeda dari sisi etnik, sebuah partai politik atau seorang pejabat publik yang tinggal atau biasa memperjuangkan kepentingan suatu daerah tertentu, cenderung akan didukung oleh pemilih dari daerah bersangkutan.⁹

Dalam pendekatan psikologis, perilaku memilih masyarakat dipengaruhi oleh adanya identifikasi kepartaian dan orientasi kandidat. Pada dasarnya pendekatan psikologis lahir dari kritikan terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis memandang bahwa perilaku memilih seseorang bukan saja dipengaruhi oleh kondisinya yang lebih baik secara sosial ekonomi atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai politik tertentu (identitas kepartaian), merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya akan dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).¹⁰

Ketiga, pendekatan pilihan rasional. Menurut pendekatan ini, seorang warga berperilaku rasional yakni, menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil yang maksimal dengan ongkos yang minimal.¹¹ Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan pemilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., hlm. 32

¹¹ Ibid., hlm 29

pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih.

Salah satu kasus yang menarik untuk melihat perilaku memilih masyarakat dalam kontestasi pilkada adalah kasus pilkada di Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 Desember 2015 untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman periode 2015-2020. Kandidat dalam pilkada ini terdapat dua pasangan calon yaitu: Benny Utama dan Daniel Lubis yang bertarung melawan pasangan Yusuf Lubis dan Atos Pratama.

Pertarungan antara Yusuf Lubis dan Benny Utama sudah terjadi selama tiga kali pemilihan Bupati dan Wakil bupati yaitu pada tahun 2005, 2010 dan 2015.

Tabel 1.1

Hasil Pilbup Kabupaten Pasaman tahun 2005

No.	Nama Paslon	Jumlah Suara	Persentase Suara
1	Benny Utama – Buyung Nurlan Tanjung	42.910	40,60%
2	Yusuf Lubis – Hamdani Burhan	50.837	48,10%
3	Khairul – Rahanum	11.941	11,29%

Sumber: KPU Sumatera Barat

Tabel 1.2

Hasil Pilbup Kabupaten Pasaman tahun 2010

No	Nama Paslon	Jumlah Suara	Persentase
1	Yusuf Lubis – Syafrialis	57.577	43,74 %
2	Benny Utama – Daniel Lubis	74.037	56,26 %

Sumber: KPU Sumatera Barat

Tabel 1.3

Hasil Pilbup Kabupaten Pasaman tahun 2015

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Benny Utama-Daniel Lubis	64.339	49,51 %
2	Yusuf Lubis-Atos Pratama	65.624	50,49%

Sumber : KPU Sumatera Barat

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada pilkada 2015 suara dari pasangan Yusuf Lubis-Atos Pratama mengungguli suara yang diperoleh oleh pasangan Benny Utama-Daniel Lubis. Jumlah suara yang diperoleh oleh Pasangan Yusuf Lubis-Atos Pratama adalah 65.624 suara atau sebanyak 50,49 % lebih banyak dibandingkan dengan suara yang diperoleh oleh pasangan Benny Utama dan Daniel Lubis yaitu sebanyak 64.339 suara atau 49,51%. Pasangan Yusuf Lubis dan Atos Pratama unggul 1285 suara atau sekitar 0,98% dari pasangan Benny Utama-Daniel Lubis.

Hasil dari Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2015, menjadi kajian menarik bagi peneliti terutama mengenai faktor perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman yaitu karena memiliki hubungan dengan orientasi

kedaerahan, etnisitas dan Restrospektif Voter. Berikut adalah data awal yang ditemukan oleh peneliti:

Tabel 1.4

Hasil Perolehan Suara di setiap kecamatan pada Pilkada Kabupaten Pasaman pada Tahun 2015

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
1	Bonjol	17.361	10.769	1.6583	10.519	250	10.769
2	Duo Koto	18.652	12.740	1.4862	12.381	359	12.740
3	Lubuk Sikaping	32.270	24.691	1.17048	24.174	517	24.691
4	Mapat Tunggul	6.489	4.532	1.2500	4.386	149	4.535
5	Mapat Tunggul Selatan	6.196	4.307	1.2270	4.158	149	4.307
6	Padang Gelugur	20.681	14.233	1.4773	13.923	310	14.233
7	Panti	21.758	14.995	1.7568	14.647	348	14.995
8	Rao	18.030	12.355	1.2153	12.107	248	12.355
9	Rao Selatan	15.592	11.739	1.4311	11.518	221	11.739
10	Rao Utara	8.068	6.060	1.1659	5.928	140	6.060
11.	Simpang Alahan Mati	8.272	5.129	1.2722	5.009	120	5.129
12.	Tigo Nagari	16.902	11.495	1.7890	11.221	275	11.495

Sumber : pilkada2015.kpu.go.id/pasamankab

Dari beberapa pendekatan di atas peneliti menjadikan pendekatan sosiologis menjadi asumsi awal bahwa orientasi kedaerahan dan etnik menjadi salah satu acuan masyarakat untuk memilih seorang calon atau kandidat. Hal ini dibuktikan dengan menangnya suara Yusuf Lubis dan Atos Pratama di daerah asalnya yaitu Kecamatan Rao dan kecamatan di sekitarnya. Begitu juga sebaliknya

Pasangan Benny Utama dan Daniel Lubis memenangkan suara di daerah asal nya yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping dan kecamatan di sekitarnya.

Variabel lain yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman adalah faktor etnisitas. Hal ini didasarkan pada survey awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara dengan salah satu wali nagari di Kecamatan Rao yaitu Wali Nagari Tarung-Tarung. Beliau mengatakan bahwa jumlah etnis Mandailing di Nagari Tarung-Tarung sekitar 50 persen, 40 persen adalah minang serta sisanya adalah gabungan dari berbagai etnis.¹² Artinya adalah, pengaruh etnis juga sangat berhubungan dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman karena Yusuf Lubis dan Atos Pratama juga memenangkan suara di Nagari Tarung-Tarung tersebut.

Tabel 1.5

Hasil Pilbup Kabupaten Pasaman tahun 2015 di Nagari Tarung-Tarung

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Benny Utama-Daniel Lubis	1.564	17,15 %
2	Yusuf Lubis-Atos Pratama	7.555	82.85 %

Sumber : pilkada2015.kpu.go.id/pasamankab

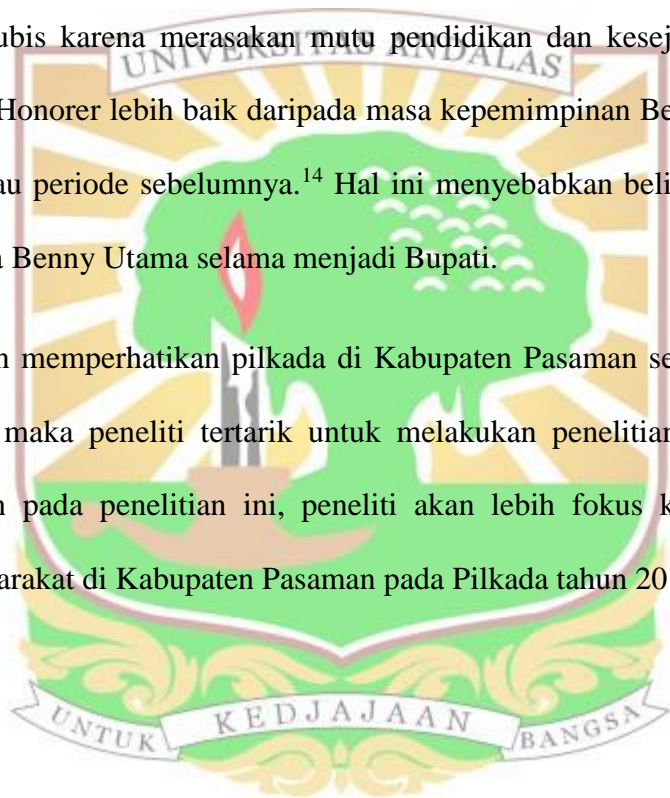
Faktor Orientasi Kandidat juga merupakan salah satu asumsi awal yang ditemukan peneliti untuk menganalisis perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Mantan Wali Nagari di Nagari Lubuak Layang yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuak Layang lebih tinggi pada saat Benny Utama menjadi Bupati.

¹² Wawancara dengan Wali Nagari Tarung-Tarung Asfar, Kecamatan Rao, 6 maret 2018

Oleh karena itu beliau menilai kinerja Benny Utama lebih baik daripada Yusuf Lubis.¹³

Variabel Terakhir dalam penelitian ini adalah retrospektif voter. Data awal yang peneliti dapatkan adalah berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang responden dimana beliau adalah seorang Guru Honorer di salah satu sekolah dasar yang mengatakan bahwa beliau memilih pasangan Benny Utama dan Daniel Lubis karena merasakan mutu pendidikan dan kesejahteraan beliau sebagai Guru Honorer lebih baik daripada masa kepemimpinan Benny Utama dan pasangan beliau periode sebelumnya.¹⁴ Hal ini menyebabkan beliau merasa puas dengan kinerja Benny Utama selama menjadi Bupati.

Dengan memperhatikan pilkada di Kabupaten Pasaman sejak tahun 2005 hingga 2015, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman. Dan pada penelitian ini, peneliti akan lebih fokus kepada perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada Pilkada tahun 2015.



¹³ Wawancara dengan Mantan Wali Lubuk Layang Imran Efendi , Kecamatan Rao Selatan, 13 mei 2018

¹⁴ Wawancara dengan Yulia Hermika S.Pd , Guru Honorer, Lubuk Layang, 13 Mei 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana hubungan Orientasi kedaerahan dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada pilkada 2015.
- Bagaimana hubungan etnisitas dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada pilkada 2015.
- Bagaimana hubungan orientasi kandidat dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada pilkada 2015.
- Bagaimana hubungan restrospektif voter dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2015

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan Orientasi kedaerahan dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada pilkada 2015.
- Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana hubungan orientasi kandidat dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada pilkada 2015.
- Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana hubungan etnis dengan perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada pilkada 2015.

- Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana hubungan restropektif voter terhadap perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2015

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama untuk memperkaya khasanah penelitian khususnya tentang perilaku memilih di daerah majemuk.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap perilaku memilih masyarakat.

